

EVALUASI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PLUS PADA BIDANG KESEHATAN DI MASA PANDEMI COVID – 19 KELURAHAN BUJEL KOTA KEDIRI

Muhammad Alif Izzuddin

Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

E-mail : muhammad.18055@mhs.unesa.ac.id

Tjitjik Rahaju

Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

E-mail : tjitjikrahaju@unesa.ac.id

Abstrak

Pandemi COVID – 19 telah menjangkau daerah di Indonesia dan menuntut setiap pemerintah daerah melakukan upaya penanggulangan. Langkah ini dilakukan oleh pemerintah Kota Kediri dengan mengeluarkan Perwali Nomor 23 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Plus. Peraturan tersebut dibuat untuk pelaksanaan Prodama Plus periode 2021 dimana setiap RT menerima dana 100 juta rupiah dalam satu tahun. Penelitian ini berfokus pada bidang kesehatan dengan tujuan untuk menganalisis evaluasi pelaksanaan Prodama Plus pada bidang kesehatan di Kelurahan Bujel Kota Kediri. Pendekatan penelitian adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Fokus penelitian pada evaluasi Prodama Plus di bidang kesehatan dengan menggunakan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn yang meliputi enam indikator yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*. Teknik analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian terhadap evaluasi pelaksanaan Prodama Plus menunjukkan bahwa berjalannya kebijakan sudah memenuhi enam indikator evaluasi kebijakan. Masalah yang ditemui adalah kurangnya pembiayaan untuk kegiatan yang bersifat wajib serta kurangnya komunikasi antara pengurus RT dan dinas kesehatan yang bertanggungjawab dalam pembayaran iuran JKN melalui Prodama Plus. Saran yang dapat disampaikan adalah perlunya penambahan jumlah biaya untuk kegiatan yang bersifat wajib untuk memenuhi kebutuhan peserta dan perlu memperbaiki komunikasi untuk memastikan kejelasan pembayaran iuran JKN.

Kata Kunci : evaluasi, pemberdayaan masyarakat, COVID – 19

Abstract

The COVID – 19 pandemic has reached region in Indonesia and requires every local government to overcome it. This step followed by Kediri Government to publishes Mayor of Kediri number 23 of 2020 about guidelines for community empowerment plus (Prodama Plus). The regulation made to implement Prodama Plus in 2021 where every neighbourhood has received 100 billion rupiah a year. The research has focus in health sector and purpose of the research to analysis evaluation of Prodama Plus especially in health sector in Bujel Region of Kediri. The research use qualitative approach with type of research is descriptive. Focus of the research in evaluation of Prodama Plus for healthy sector and use analysis by theory of policy evaluation from William N. Dunn there contains six points, effectiveness, efficiency, adequacy, distribution, responsiveness, and accuracy. Data collected by observation, interview and documentation and use *purposive sampling*. Data analysis techinque are contains collecting, reduction, presentation, and take conclusion. The result of research show that implementation of Prodama Plus has completed in criteria of six points in policy evaluation. Problem that find in the research there are lack of funding in mandatory activities and misscommunication between the neighbourhood's admin and Kediri's health departement who has responsibility pay JKN through Prodama Plus. Suggestion that can be given are should to increase fund for that activities to cover the participant of the activities and need to fix communication for ensure clarity of the dues payment in JKN.

Keywords : evaluation, community empowerment, COVID – 19

PENDAHULUAN

Peningkatan kapasitas masyarakat, pembangunan, dan pemberdayaan sering digunakan sebagai sebuah proses dalam meningkatkan aset dan atribut yang dimanfaatkan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup (Eger et al., 2018). Salah satu upaya dalam meningkatkan taraf hidup adalah melalui pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kapasitas masyarakat. Pemberdayaan berasal dari kata 'daya' yang berarti diberi kekuatan. Pemberdayaan masyarakat memiliki esensi sebagai peningkatan keterampilan pada warga negara untuk merencanakan, membangun, dan memelihara proses pembangunan secara mandiri. (Muchson, 2020).

Ahmad dkk (2015) menggambarkan pemberdayaan sebagai kekuatan untuk meningkatkan kapasitas dan aset masyarakat. Sehingga dibutuhkan keterlibatan anggota masyarakat daripada tindakan individu (Khalid et al., 2019). Menurut badan kesehatan dunia (WHO) pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses untuk melibatkan orang – orang dalam mendefinisikan isu – isu yang menjadi perhatian mereka, dalam membuat keputusan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupan mereka. (Luisi & Hamel, 2021).

Menurut Suharto (2009) permasalahan yang muncul di tengah masyarakat membutuhkan praktik pemberdayaan sumber daya Manusia (SDM). Pemberdayaan masyarakat diarahkan untuk meningkatkan kepercayaan diri dalam berpartisipasi pada kegiatan sosial, serta meningkatkan kemandirian melaksanakan tugas-tugas kehidupan (Saleh dan Mujahidin, 2020). Pemberdayaan Masyarakat adalah proses dalam menciptakan masyarakat yang jauh lebih besar untuk memberikan kontrol terhadap lingkungannya (Badaruddin et al., 2020). Pemberdayaan masyarakat didasari oleh adanya kesadaran bahwa setiap masyarakat memiliki kapasitas diri yang berbeda-beda, dimana dengan kapasitas itu masyarakat dapat meningkatkan kemandirian dan kekuatan-kekuatan lokal yang pada akhirnya akan membawa pada suatu perubahan sosial ekonomi masyarakat yang baik pula. (Zakaria, 2016)

Wabah penyakit Coronavirus Disease (COVID – 19) menimbulkan situasi darurat di seluruh dunia karena penyebarannya yang cepat disertai dengan angka. Jumlah pengidap syndrome gangguan pernafasan akut coronavirus 2 (SARS-CoV-2) yang menjadi penyebab COVID – 19,

meningkat pesat di seluruh dunia. (Yang et al., 2020). WHO menetapkan COVID – 19 sebagai darurat kesehatan nasional pada 30 Januari 2020. Penambahan jumlah kasus COVID-19 berlangsung cukup cepat dan sudah terjadi penyebaran antar negara membuat WHO menaikkan status dari COVID – 19 menjadi pandemi pada 12 Maret 2020 (Putri, 2020).

Meningkatnya status COVID – 19 sebagai pandemi menyebabkan terganggunya aktivitas di seluruh dunia. Setiap negara memiliki kebijakan yang berbeda dalam merespon terjadinya pandemi karena adanya keterbatasan kemampuan pemerintah yang bersangkutan. (Parr et al., 2020). Keterbatasan pemerintah suatu negara dalam mengurangi penyebaran COVID - 19 diawali dengan hal kecil seperti mengeluarkan himbauan untuk memakai masker. Sedangkan di China, himbauan untuk memakai masker sebagai kebijakan nasional. Selain mengeluarkan himbauan untuk memakai masker, juga disarankan agar orang – orang selalu menjaga kebersihan dengan rutin mencuci tangan dan menghindari sentuhan dengan mata, hidung, dan wajah. (Ciotti et al., 2020).

Kebijakan didefinisikan oleh Thomas R. Dye yaitu apapun pilihan tindakan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dalam pendapat Thomas R. Dye pilihan tindakan tersebut digunakan dalam menangani berbagai bidang yang berkaitan langsung dengan kehidupan pemerintahan suatu daerah atau negara (Heliany, 2019). David Easton menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan pengalokasian nilai secara keseluruhan (Kusumawati, 2019). Menurut Carl Friedrich kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah pada lingkungan tertentu terdapat masalah dan kesempatan yang memerlukan penyelesaian melalui usulan kebijakan tersebut agar mencapai tujuan yang diinginkan (Nasriza & F.Yasmeardi, 2020).

Kondisi yang dialami di berbagai negara juga terjadi di Indonesia. Pemerintah mengeluarkan anjuran untuk melakukan *physical distancing* kepada masyarakat untuk mengurangi penyebaran virus. Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) juga dikeluarkan pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) no 11 tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 21 tahun 2020 (Susilawati, 2020). Langkah preventif diambil pemerintah dalam meningkatkan kedisiplinan dalam

menegakkan protokol kesehatan dalam pencegahan COVID – 19. Pada batas – batas wilayah yang menjadi area keluar masuk pelancong seperti bandara, pelabuhan, dan pos batas lintas darat juga dilakukan pengawasan secara ketat oleh pemerintah Indonesia.(Lystianingrum &Philona, 2021).

Peran pemerintah daerah juga diperlukan untuk menghindari adanya ketidaksesuaian dengan pemerintah pusat dalam penanggulangan wabah. (Muhawarman et al., 2017). Salah satu kebijakan pemerintah daerah adalah menginisiasi Karantina wilayah dalam mengurangi penyebaran COVID – 19. (Suherman, 2020). Menurut Aryanto (2020) pemerintah daerah perlu mengambil peran dalam penanggulangan situasi tanggap darurat COVID – 19 tanpa mengesampingkan kebijakan yang telah di keluarkan oleh pemerintah pusat. Maka kebijakan setiap daerah diperlukan dalam mendukung berlangsungnya era “*new normal*”. (Pratiwi, 2021).

Salah satu daerah yang melaksanakan penanganan COVID – 19 adalah Kota Kediri. Pemerintah Kota Kediri mengeluarkan kebijakan program pemberdayaan masyarakat plus (Prodamas Plus). Prodamas merupakan program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat untuk meningkatkan pembangunan di Kota Kediri pada bidang infrastruktur, sosial, dan ekonomi. Program prodamas juga dikenal sebagai program 50 juta per RT (wilayah kecil Kota Kediri) per tahun. (Setianingsih & Aalin, 2020).

Pelaksanaan Prodamas telah dimulai sejak tahun 2015 dengan mengalokasikan dana sebesar 50 juta rupiah untuk tiap RT per tahun. (Widyastuti, 2018). Sumber dana prodamas berasal dari APBD. Kota Kediri dengan total kurang lebih Rp 1,3 Triliun dengan rincian Rp 1,1 Triliun dari negara dan Rp 200 Milyar merupakan pendapatan daerah. Sedangkan untuk prodamas dianggarkan sebesar Rp 77 Miliar. (Farhan, 2017). Ketentuan mengenai prodamas diatur dalam Perwali Nomor 40 tahun 2014 dimana alokasi prodamas diperuntukkan dalam pembangunan infrastruktur sebesar 60%. Sedangkan untuk bidang sosial dan ekonomi, dialokasikan sebesar 40%.(Nur dan Rahayu, 2020:3).

Pada periode 2019 pemerintah kota Kediri meluncurkan “Prodamas Plus” dengan alokasi dana yang dikeluarkan untuk setiap RT senilai 100 juta rupiah per tahun. Alokasi Prodamas Plus periode ini lebih difokuskan pada bidang kesehatan. (Asmoro & Setianingsih, 2019). Adapun tujuan dari Prodamas Plus yaitu menggerakkan dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif

dalam kegiatan pembangunan diwilayahnya, memfasilitasi masyarakat dalam mengartikulasikan kebutuhannya dan membantu mengidentifikasi masalahnya, meningkatkan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana lingkungan RT, meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan sosial, dan meningkatkan peran serta dan mendorong keberdayaan masyarakat dalam pembangunan.(Anggraeni, 2018).

Di dalam proporsi anggaran yang telah tercantum dalam pasal 20 Perwali Nomor 23 tahun 2020 bidang kesehatan mendapatkan alokasi terbanyak diantara bidang lainnya (Perwali kota Kediri nomor 23 tahun 2020). Hal ini mengingat bahwa kota Kediri masih dalam situasi pandemi COVID – 19. Sehingga dalam pemanfaatan dana Prodamas Plus bidang kesehatan mendapatkan proporsi anggaran lebih besar. Pada pasal 14 Perwali Nomor 23 tahun 2020 Pembiayaan pada bidang kesehatan dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta membantu pengadaan sarana dan prasarana di bidang kesehatan dalam skala kecil yang meliputi :

- a) Pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi masyarakat;
- b) Pengadaan mebeleur dan peralatan layanan kesehatan posyandu (lansia / balita) berupa alat-alat cek kesehatan (gula darah, kolesterol, asam urat dan thermometer), timbangan injak, timbangan dacin, celana timbang, keranjang timbang, tikar stunting dan APE;
- c) Pengadaan sarana dan prasarana pendukung perilaku hidup bersih dan sehat, seperti :
- d) Pemberian makanan tambahan (PMT) dan vitamin di posyandu; dan/atau
- e) Pengadaan sarana prasarana umum bidang kesehatan pendukung kampung keren.

Salah satu Kelurahan di Kota Kediri yang melaksanakan program Prodamas Plus adalah Kelurahan Bujel. Dikutip dari laman <https://kel-bujel.kedirikota.go.id/> Kelurahan Bujel memiliki enam RW dan 34 RT serta memiliki jumlah penduduk sebanyak 6.772 jiwa. Secara geografis, Kelurahan Bujel terletak di sebelah Barat Kecamatan Mojoroto Kota Kediri dan berbatasan dengan empat kelurahan. Diantaranya Kelurahan Gayam di barat, Kelurahan Mojoroto di timur, Kelurahan Ngampel di utara, dan Kelurahan Sukorame di selatan.

Pemerintah kota Kediri memberi kepercayaan kepada Kelurahan Bujel sebagai kelurahan rujukan dalam pengelolaan Prodamas

Plus. Kemudian Kelurahan Bujel juga telah mendapatkan prodamas award selama dua tahun berturut – turut pada periode 2018 dan 2019. (Nur dan Rahayu, 2020:4). Prestasi tersebut yang mendorong peneliti untuk melaksanakan penelitian evaluasi Prodama Plus di Kelurahan Bujel Kota Kediri. Dari prestasi yang diraih tersebut dapat dikatakan bahwa Kelurahan Bujel merupakan Kelurahan yang aktif dalam menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan melalui Prodama Plus.

Implementasi Prodama Plus di Kelurahan Bujel yang sudah berjalan mengedapankan aspirasi dari masyarakat. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian dari Nur dan Rahayu (2020) bahwa masyarakat di Kelurahan Bujel aktif untuk menyampaikan aspirasinya mengenai kebutuhan umum yang dibutuhkan oleh lingkungan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Irameimuna (2016) disebutkan bahwa implementasi Prodama di Kelurahan Bujel diawali dengan pengumpulan usulan melalui rembug RT. Usulan tersebut akan didata dalam berita acara kemudian dilanjutkan kepada kelompok masyarakat (Pokmas) Kelurahan Bujel. Pada tahap Pokmas akan melakukan seleksi terhadap kegiatan dan kebutuhan yang mendapatkan biaya dari prodama untuk selanjutnya bisa dicairkan dalam bentuk uang atau barang jadi yang siap digunakan.

Dikutip dari <https://www.kedirikota.go.id/> walikota Kediri, mengambil keputusan untuk mengalihkan dana Prodama Plus periode 2020 untuk menangani pandemi COVID – 19 di Kota Kediri. Maka setiap kegiatan Prodama Plus serta pembiayaan baru terealisasi pada tahun 2021. Permasalahan yang dihadapi adalah bahwasannya tidak semua kegiatan dan kebutuhan dapat diakomodir di dalam Prodama Plus. Maka evaluasi dalam pelaksanaan Prodama Plus penting dilakukan untuk mengetahui apa saja macam kebutuhan dan kegiatan di bidang kesehatan yang bisa didanai oleh Prodama Plus. Serta untuk mengetahui seberapa besar manfaat yang diperoleh dari pembiayaan kegiatan atau kebutuhan tersebut bagi masyarakat dan pihak Kelurahan Bujel.

Menurut Situmorang evaluasi dilakukan untuk menemukan penyebab dari kegagalan suatu kebijakan serta untuk menemukan dampak yang dicita – citakan dari kebijakan tersebut (Amanda, 2016). Menurut Stewart dan Lester evaluasi kebijakan merupakan usaha untuk menilai konsekuensi kebijakan melalui dampak dan keberhasilan kebijakan melalui standar nilai tertentu. (Apriliani et al., 2019). Kemudian menurut William

N. Dunn evaluasi kebijakan berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai dan manfaat (Angeline & Sulandari, 2017). Maka berdasarkan definisi diatas, evaluasi kebijakan merupakan usaha untuk menilai konsekuensi sebuah kebijakan untuk mengetahui keberhasilan dan dampak yang diharapkan dari penerapan sebuah kebijakan.

Penelitian evaluasi mengenai pelaksanaan Prodama Plus bertujuan untuk menganalisis evaluasi pelaksanaan Prodama Plus di Kelurahan Bujel Kota Kediri pada bidang kesehatan. Manfaat teoritis dari penelitian adalah untuk mendukung pengembangan ilmu pengetahuan pada bidang kebijakan publik khususnya di dalam program studi S1 Ilmu Administrasi Negara. Sedangkan manfaat praktis adalah sebagai bahan masukan kepada pemerintah Kota Kediri dalam melaksanakan Prodama Plus untuk periode yang akan datang serta memberi masukan dalam memecahkan masalah dalam pelaksanaan Prodama Plus di Kelurahan Bujel pada periode 2021.

Penelitian berlokasi di Kelurahan Bujel Kecamatan Kota Kediri. Dengan fokus pada evaluasi program Prodama Plus di bidang kesehatan. Analisis evaluasi kebijakan terhadap program Prodama Plus di bidang kesehatan menggunakan enam indikator evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn yang meliputi;

1. Efektivitas, berkaitan antara hasil yang diinginkan dengan tujuan yang ingin dicapai
2. Efisiensi, berkaitan dengan alokasi sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan
3. Kecukupan, berkaitan dengan manfaat dari implementasi kebijakan
4. Pemerataan, berkaitan dengan distribusi manfaat pelaksanaan kebijakan
5. Responsivitas, tanggapan dan respon dari kelompok sasaran terhadap implementasi kebijakan
6. Ketepatan, berkaitan dengan seberapa besar kebijakan dapat menyelesaikan permasalahan pada kelompok sasaran.

Jenis Evaluasi adalah evaluasi formal. Dimana evaluasi formal dilaksanakan pada saat berjalannya kebijakan. Maka penulisan artikel ilmiah ini mengambil judul “Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat Plus Pada Bidang Kesehatan Di Masa Pandemi COVID – 19 Kelurahan Bujel Kecamatan Mojojoto Kota Kediri.”

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan

kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah memberikan gambaran terhadap fenomena sosial atau sebuah kasus. (Ma'ruf & Isbandono, 2016). Dalam penelitian ini mengangkat evaluasi program pemberdayaan masyarakat plus (Prodamas Plus) pada bidang kesehatan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn yang meliputi enam indikator yaitu efektivitas, efisien, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber data melalui wawancara dan observasi langsung. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh secara tidak langsung dari sumber data melalui dokumentasi dan dokumen lain yang mendukung penelitian.

Penelitian ini bertempat di Kelurahan Bujel Kecamatan Mojojoto Kota Kediri. Adapun teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik *purposive sampling* disesuaikan dengan tujuan melakukan penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut,

1. Lurah Bujel
2. Kelompok Masyarakat (Pokmas)
3. Kader Posyandu
4. Bidang Wilayah Bujel
5. Ketua RT

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model menurut Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan

PEMBAHASAN

Prodamas merupakan program pemberdayaan masyarakat yang memiliki tujuan dalam meningkatkan partisipasi dan peran masyarakat untuk melaksanakan pembangunan di Kota Kediri. Diterbitkannya Perwali Kota Kediri Nomor 23 tahun 2020 pemerintah Kota Kediri membentuk program lanjutan yang diberi nama Prodamas Plus. Program ini merupakan lanjutan prodamas dengan tujuan yang sama dalam meningkatkan partisipasi dan peran aktif masyarakat untuk melaksanakan pembangunan di tingkat Kelurahan yang berbasis di wilayah Rukun Tetangga (RT).

Perwali Kota Kediri Nomor 23 tahun 2020

tentang pedoman teknis pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat plus digunakan sebagai pedoman untuk pelaksanaan Prodamas Plus pada tahun 2021. Anggaran yang dikeluarkan untuk pelaksanaan Prodamas Plus pada tahun 2021 sejumlah 147,8 Miliar Rupiah. Anggaran tersebut kemudian dibagikan pada 1.478 lingkungan RT yang ada di Kota Kediri

Penyaluran dana Prodamas diawali pada tingkat Kelurahan. Dalam satu kelurahan terdapat kelompok masyarakat (Pokmas) yang bertugas untuk mengelola dana Prodamas Plus dan menyaring usulan dari setiap lingkungan RT di Kelurahan Bujel. Kelurahan akan mengirimkan dana Prodamas Plus melalui Pokmas Kelurahan Bujel. Sebelum dicairkan untuk pembiayaan kegiatan terlebih dahulu tim Pokmas akan menyaring dan melakukan seleksi terhadap usulan dari setiap RT. Usulan tersebut diperoleh melalui rembug warga yang diadakan setiap RT dalam menyaring aspirasi mengenai kebutuhan umum yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat. Usulan yang disetujui oleh tim Pokmas inilah yang akan memperoleh pembiayaan dari Prodamas Plus. Penyaluran tidak berbentuk uang tunai saja, akan tetapi dari tim pokmas dan RT yang akan mencairkan anggaran Prodamas Plus ke dalam wujud barang atau perlengkapan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Kelurahan Bujel merupakan kelurahan yang aktif dalam menyelenggarakan kegiatan yang didanai oleh Prodamas Plus. Salah satu ketua RT di Kelurahan Bujel memberikan pendapat bahwasannya pada saat sebelum terjadi pandemi COVID – 19, Kelurahan Bujel sudah aktif melaksanakan kegiatan Prodamas Plus hingga pada periode 2021. Bapak Mujiyo selaku Lurah Bujel juga menyampaikan keberlangsungan Prodamas Plus di Kelurahan Bujel,

“Untuk Kelurahan Bujel ada tiga pokmas yang membantu pelaksanaan Prodamas Plus di Bujel. Pokmas ini nanti yang mengawal dana Prodamas Plus sampai merealisasikan kebutuhan masyarakat. Dari semua kegiatan di bidang kesehatan, setiap RT wajib menganggarkan untuk JKN sama PMT. Kalau untuk alat kesehatan dan sarana prasarana kita tidak bisa memastikan karena setiap RT punya usulan yang berbeda – beda,”

Program Pemberdayaan Masyarakat Plus

(PRODAMAS PLUS) yang dilaksanakan di Kelurahan Bujel Kecamatan Mojoroto Kota Kediri dalam bidang kesehatan dianalisis menggunakan teori evaluasi kebijakan menurut Willaim N. Dunn. Adapun di dalamnya memuat enam poin evaluasi kebijakan antara lain efektivitas, efisien, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Berikut adalah hasil penelitian yang penulis temukan :

1. Efektivitas

Menurut William N. Dunn efektivitas berkaitan antara hasil yang diharapkan dengan tujuan yang ingin dicapai (Asyiah dkk, 2018:6) Sebuah kebijakan dikatakan efektif apabila tujuan dari implementasi kebijakan mampu mencapai tujuan. Adapun tujuan di dalam pelaksanaan Prodama Plus di bidang kesehatan telah tercantum pada Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 23 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Program Pemberdayaan Masyarakat Plus yakni sebagai berikut :

Memfasilitasi Masyarakat Dalam Mengidentifikasi Masalah dan Membantu Mengartikulasi Kebutuhannya.

Partisipasi masyarakat di dalam Prodama Plus sangat diperlukan untuk menampung usulan – usulan yang berkaitan dengan kebutuhan umum di masyarakat. Warga mendapatkan kesempatan langsung melalui forum rembug warga yang dilaksanakan di tingkat Rukun Tetangga (RT). Sehingga melalui forum ini, pengurus RT bisa menjaring usulan dari masyarakat untuk diusulkan ke dalam perencanaan Prodama Plus.

Alokasi anggaran yang wajib diusulkan oleh setiap RT untuk bidang kesehatan adalah pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi masyarakat yang belum tercover oleh BPJS dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) di Posyandu. Sedangkan untuk program lainnya, masyarakat dapat mengusulkan sarana dan prasarana untuk menunjang perilaku hidup bersih di lingkungan RT serta mengusulkan pengadaan alat pemeriksaan kesehatan dan kebutuhan mebeleur untuk Posyandu.

Pelaksanaan Prodama Plus pada bidang kesehatan di Kelurahan Bujel telah mengakomodir seluruh kebutuhan masyarakat baik usulan wajib dan usulan lainnya di bidang kesehatan. Pada pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional, pengurus RT di Kelurahan Bujel akan mendaftarkan identitas warganya yang berhak untuk diikutsertakan ke dalam iuran Jaminan Kesehatan Nasional yang dibiayai oleh Prodama Plus. Berdasarkan hasil

wawancara dengan Bapak Sholeh selaku staff Kelurahan Bujel yang bertanggungjawab terhadap Prodama Plus bahwasannya program JKN yang pada periode ini didukung oleh PRODAMAS PLUS sangat membantu masyarakat. Sebab tidak semua masyarakat di Kelurahan Bujel memiliki akses jaminan kesehatan melalui BPJS. Sehingga Prodama Plus memberikan fasilitas dalam pembayaran iuran JKN bagi masyarakat yang belum terdaftar di dalam BPJS.

Kemudian dalam memenuhi kebutuhan masyarakat lainnya, Kelurahan Bujel juga telah melaksanakan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang pada periode ini dibiayai oleh Prodama Plus. Kebutuhan terhadap PMT dipandang penting pada masa pandemi untuk meningkatkan gizi dan meningkatkan imun masyarakat di masa pandemi.

Memfasilitasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan RT

Salah satu upaya dalam pencegahan COVID – 19 adalah dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Maka Prodama Plus memberi kesempatan kepada masyarakat pada setiap lingkungan RT untuk mengusulkan sarana dan prasarana yang dapat menunjang pola hidup bersih dan sehat. Sehingga upaya pencegahan terhadap COVID – 19 bisa dimulai dari lingkungan yang terdekat.

Sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat untuk menunjang pola hidup bersih salah satunya adalah pengadaan tempat cuci tangan. Salah satu lingkungan RT yang memberikan fasilitas tempat cuci tangan adalah lingkungan RT 06 RW 04 Kelurahan Bujel. Dimana setiap rumah di lingkungan RT 06 memiliki tempat cuci tangan yang berbentuk guci berwarna hitam dan diletakkan di depan rumah masing – masing warga. Selain tempat



Gambar 1. Fasilitas Tempat Cuci Tangan

Sumber : Arsip dokumentasi Prodama Plus Kelurahan Bujel Kota Kediri

cuci tangan yang diberikan pada setiap rumah, pengurus RT juga menganggarkan masker, handsanitizer, dan alat penyemprot disinfektan.

Sarana dan Prasarana lainnya adalah pengadaan kebutuhan mebeleur dan berbagai alat untuk pemeriksaan kesehatan di Posyandu. Di samping melaksanakan kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT), posyandu juga mengadakan kegiatan Pos Binaan Terpadu (POSBINDU). Kegiatan ini dilaksanakan bersamaan dengan PMT setiap satu bulan sekali. Dalam Posbindu, masyarakat mendapatkan fasilitas untuk memeriksakan kesehatan secara langsung. Sehingga di dalam pelaksanaan Posbindu terdapat alat – alat kesehatan yang seluruhnya dianggarkan melalui Prodamas Plus. Seperti yang terdapat pada Posyandu Dahlia. Posyandu ini memiliki berbagai alat kesehatan seperti tensi meter, alat cek gula darah, asam urat, dan kolesterol, dan alat timbang. Kemudian juga terdapat sarana dan prasarana mebeleur seperti meja dan kursi untuk pelaksanaan kegiatan Posyandu. Seluruh sarana dan prasarana tersebut dianggarkan melalui Prodamas Plus. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Kegiatan – Kegiatan Ekonomi, Sosial, Pendidikan, Kesehatan, dan Kepemudaan

Dalam pelaksanaan Prodamas Plus terdapat berbagai bidang yang memperoleh alokasi anggaran. Persentase alokasi anggaran untuk setiap bidang telah diatur di dalam Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 23 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Plus. Untuk periode 2021, bidang kesehatan memperoleh persentase terbesar yaitu sebanyak 50%.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan, pemerintah Kota Kediri telah menetapkan berbagai usulan yang wajib tercantum dalam penganggaran Prodamas Plus 2021. Di bidang kesehatan terdapat dua usulan yang wajib tercantum di dalam perencanaan Prodamas Plus pada setiap RT. Yaitu pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk posyandu.

Kelurahan Bujel memiliki 6 RW dengan jumlah RT sebanyak 34. Setiap RT memiliki jumlah yang berbeda untuk warga yang diikutsertakan dalam pembayaran iuran JKN melalui Prodamas Plus. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sholeh selaku staff kelurahan Bujel terdapat 538 kepala keluarga yang terdaftar di dalam peserta iuran JKN yang dibiayai langsung oleh Prodamas

Plus.

Wujud peningkatan kesejahteraan di bidang kesehatan lainnya adalah melalui kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang diselenggarakan oleh posyandu. Dalam pelaksanaannya, kegiatan PMT mendapatkan arahan dan pembinaan langsung dari bidan wilayah untuk Kelurahan Bujel serta puskesmas. Pelaksanaan PMT di Kelurahan Bujel diawali oleh Posyandu Dahlia sebagai percontohan untuk posyandu kelompok anak di bawah lima tahun (Balita). Kemudian untuk posyandu kelompok lanjut usia (Lansia) dilaksanakan oleh posyandu Mekar Sehati. Meningkatkan Peran Serta dan Mendorong Keberdayaan Masyarakat

Alokasi yang besar untuk bidang kesehatan di dalam Prodamas Plus mampu menggerakkan masyarakat Kelurahan Bujel untuk berpartisipasi dalam menjaga dan memeriksa kesehatan. Menurut Ibu Sumiyati selaku kader Posyandu Dahlia, bahwa dengan adanya PMT membuat masyarakat lebih giat untuk mendatangi posyandu. Terlebih untuk saat ini, kader posyandu juga dilibatkan dalam kegiatan rembug warga. Sehingga dalam forum tersebut, kader posyandu dapat mengusulkan berbagai sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan posyandu.

Terpenuhinya sarana dan prasarana untuk menunjang perilaku hidup bersih juga mampu menggerakkan peran masyarakat dalam meminimalisir penyebaran COVID – 19. Dalam hal ini, pengurus RT di lingkungan Kelurahan Bujel juga mengedarkan masker dan handsanitizer untuk mendorong masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan selama terjadi Pandemi COVID – 19.

Dari empat poin tujuan Prodamas Plus, berjalannya program Prodamas Plus 2021 di bidang kesehatan telah memenuhi empat tujuan yang tercantum di dalam Perwali Nomor 23 tahun 2020. Pelaksanaan Prodamas Plus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Kelurahan Bujel dalam memperoleh sarana dan prasarana di bidang kesehatan. Dengan demikian, masyarakat terdorong berpartisipasi dalam mewujudkan kebersihan lingkungan serta lebih memperhatikan kesehatan individu masyarakat dan keluarga.

2. Efisiensi

Efisiensi merupakan optimalisasi dari sumber daya dalam mencapai tujuan pelaksanaan kebijakan. Sebuah kebijakan disebut efisien apabila sumber daya yang ada mampu mengantarkan sebuah kebijakan mencapai tujuan yang telah ditentukan. (Anggraeni, 2018) Di dalam pelaksanaan Prodamas Plus pada bidang kesehatan di Kelurahan Bujel

sumber daya yang dilibatkan meliputi sumber daya manusia dan sumber daya biaya.

Pelaksanaan Prodamas Plus di bidang kesehatan melibatkan berbagai pihak pada setiap kegiatan. Pada kegiatan pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melibatkan dinas kesehatan kota Kediri dalam pembayaran iuran JKN. Maka alokasi Prodamas Plus yang digunakan untuk pembayaran iuran JKN tidak diterima langsung oleh pengurus RT tetapi langsung dikirimkan oleh pemerintah Kota Kediri kepada dinas kesehatan Kota Kediri.

Pelaksanaan JKN yang melibatkan dinas kesehatan ditemui satu masalah oleh pengurus RT. Setelah pencairan dana Prodamas Plus, pengurus RT belum menerima bukti pelunasan terhadap pembayaran iuran JKN bagi masyarakat yang diikutsertakan. Sehingga pengurus RT belum bisa memastikan warganya yang telah diikutsertakan dalam kegiatan pembayaran iuran JKN melalui Prodamas Plus telah dilunasi atau belum.

Dalam hal biaya yang dikeluarkan melalui Prodamas Plus untuk pembayaran iuran JKN yaitu sejumlah Rp 35.000 untuk setiap satu orang. Nilai tersebut dikalikan selama 12 bulan atau dalam satu tahun. Sehingga tanggungan untuk iuran satu orang dalam satu tahun adalah Rp 420.000.

Kemudian pada kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) serta pengadaan kebutuhan mebeleur dan alat – alat kesehatan untuk posyandu melibatkan peran kader posyandu, puskesmas, dan bidan wilayah untuk Kelurahan Bujel. Dalam kegiatan PMT kader posyandu berkoordinasi dengan bidan wilayah untuk menentukan menu yang akan diberikan oleh penerima PMT. Selain melibatkan bidan wilayah untuk kegiatan PMT, kader posyandu juga mendapatkan pembinaan dari ahli gizi puskesmas dalam menentukan menu yang akan diberikan untuk pelaksanaan PMT.

Observasi yang dilakukan peneliti pada pelaksanaan PMT menunjukkan bahwa dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh BKKBN Kota Kediri. Lalu diawasi oleh bidan wilayah Bujel atas nama Ibu Novi. Serta dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh petugas dari pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) sukorame yang memantau aktivitas di bidang kesehatan pada Kelurahan Bujel. Masing – masing pihak memiliki peran dalam berjalannya PMT di Kelurahan Bujel. Kader posyandu melaksanakan pemeriksaan kesehatan dan pemberian PMT kepada balita. Kemudian petugas BKKBN bertugas dalam pelaksanaan posbindu

dengan memberikan pemeriksaan kesehatan secara percuma kepada orangtua atau pengantar peserta PMT. Sedangkan bidan bertugas mengontrol dan mengawasi pelaksanaan PMT dan posbindu.

Pada pengadaan kebutuhan mebeleur dan alat – alat kesehatan untuk kegiatan posyandu, pengurus RT memberikan kesempatan kepada kader posyandu melalui forum rembug warga. Pada forum ini pengurus RT memberikan kesempatan kepada kader posyandu untuk menyampaikan usulan terkait sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan posyandu. Akan tetapi sebelum mengusulkan sarana dan prasarana, terlebih dahulu kader posyandu berkoordinasi dengan bidan wilayah untuk menentukan keperluan apa saja yang dibutuhkan dalam mendukung kegiatan posyandu. Setelah kebutuhan mebeleur dan alat kesehatan terpenuhi maka bidan wilayah akan melaksanakan pembinaan untuk kader posyandu dalam mengoperasikan alat – alat kesehatan.

Ibu Novi selaku bidan wilayah Kelurahan Bujel memberikan keterangan bahwa seluruh kader posyandu dituntut untuk dapat mengoperasikan seluruh alat – alat kesehatan yang telah dianggarkan melalui Prodamas Plus. Berikut hasil wawancara dengan Ibu Novi,

“Kader – kader kita kumpulkan, kemudian kita beri contoh cara menggunakan alat – alat kesehatannya. Setiap posyandu dan kader diberi latihan secara bergilir dan ada jadwal sendiri untuk pelatihan penggunaan alat kesehatannya. Misalnya minggu ini kita latih menggunakan tensi meter, minggu depan ganti kita latih untuk penggunaan pen lancet. Nanti setiap kader harus bisa menguasai satu alat dulu, baru mempelajari alat yang lain,”

Bidan akan memberikan jadwal kepada kader posyandu untuk dilatih mengenai penggunaan alat – alat kesehatan posyandu. Upaya ini dilakukan agar seluruh kader memiliki kemampuan yang sama dalam mengoperasikan alat kesehatan. Ibu Novi kemudian menambahkan bahwa umumnya untuk melatih kemahiran kader posyandu dalam mengoperasikan alat-alat kesehatan membutuhkan waktu tidak sampai dengan satu bulan. Di dalam pelaksanaan PMT, pemerintah Kota Kediri telah menetapkan jumlah biaya yang wajib dialokasikan untuk kegiatan PMT adalah Rp 1.500.000 dalam satu tahun. Sasaran yang ditetapkan adalah 37 balita, 35 lansia, dan 6 ibu hamil. Menurut keterangan yang diperoleh dari beberapa kader posyandu Kelurahan

Bujel. Jumlah tersebut belum mampu untuk menyediakan jumlah PMT sesuai dengan jumlah balita yang ada di lingkungan posyandu.

Seperti yang ditemukan pada Posyandu Dahlia dimana jumlah balita yang terdaftar dalam posyandu tersebut adalah sejumlah 50 balita. Sedangkan kemampuan dari Prodama Plus hanya dapat melayani PMT sejumlah 37 balita. Sehingga kader posyandu mengandalkan dana sosial yang diberikan masyarakat pada saat melakukan penimbangan. Jika masih belum mencukupi untuk menyediakan jumlah yang sesuai dengan peserta PMT maka kader posyandu akan menutup kekurangannya dengan iuran dari kader posyandu dan iuran sosial peserta posyandu.

Berjalannya Prodama Plus 2021 untuk bidang kesehatan belum memenuhi kriteria efisien untuk pembiayaan pada kegiatan PMT. Sedangkan untuk pembiayaan kegiatan lain tergantung pada kebutuhan setiap lingkungan RT karena setiap lingkungan RT memiliki usulan yang berbeda dalam menganggarkan sarana dan prasarana. Untuk efisiensi SDM pada Prodama Plus 2021, kegiatan JKN belum optimal dalam memaksimalkan SDM dan dibutuhkan komunikasi antara Kelurahan Bujel, Dinas Kesehatan Kota Kediri, serta pengurus RT yang ada di lingkungan Kelurahan Bujel Kota Kediri.

3. Kecukupan

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan bahwa tujuan dari implementasi kebijakan telah mampu untuk mengatasi masalah yang ada. (Soulisa, 2017). Maka dalam hal kecukupan masih terdapat persamaan dengan efektivitas. Dimana kebijakan mampu mencapai tujuan yang ditentukan dalam mengatasi masalah. Sehingga kebijakan telah memenuhi kriteria kecukupan apabila kebijakan tersebut mampu memenuhi penyelesaian masalah sebelum kebijakan dilaksanakan.

Salah satu tujuan pelaksanaan Prodama Plus 2021 yaitu untuk memfasilitasi masyarakat dalam mengidentifikasi masalah dan membantu mengartikulasi kebutuhannya. Tujuannya untuk mengakomodir masalah yang ada di dalam lingkungan masing – masing RT. Kemudian dari permasalahan tersebut akan muncul usulan dari warga melalui forum rembug desa untuk menyampaikan usulan mengenai kebutuhan yang bersifat umum dan dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat pada lingkungan tersebut serta digunakan dalam memecahkan permasalahan yang ada.

Pelaksanaan Prodama Plus di bidang

kesehatan untuk periode 2021 telah membantu masyarakat di Kelurahan Bujel dalam mengatasi masalah di bidang kesehatan. Melalui kegiatan pembayaran iuran JKN yang dianggarkan lewat Prodama Plus mampu membantu masyarakat di Kelurahan Bujel yang tidak mampu dalam

NO	NAMA	ALAMAT	JUMLAH RT
1	OWI SUSANTO	Kelurahan RT 01 RW I	36 ORANG
2	SUMARU	Kelurahan RT 02 RW I	63 ORANG
3	SUMAYATI	Kelurahan RT 03 RW I	29 ORANG
4	AND WISODO	Kelurahan RT 04 RW I	13 ORANG
5	YULI TRANA	Kelurahan RT 05 RW I	4 ORANG
6	SUWARTINI	Kelurahan RT 06 RW I	22 ORANG
7	AGUS PRANAWA N	Kelurahan RT 01 RW II	45 ORANG
8	SUPRIYANTO	Kelurahan RT 02 RW II	51 ORANG
9	SULISTYONING	Kelurahan RT 03 RW II	88 ORANG
10	HARI ARIANTO	Kelurahan RT 04 RW II	15 ORANG
11	DESI PRASETYO	Kelurahan RT 05 RW II	36 ORANG
12	SUYITNO SH	Kelurahan RT 06 RW II	2 ORANG
13	MAHESU YUNANTO	Kelurahan RT 01 RW III	6 ORANG
14	PANDU S P	Kelurahan RT 02 RW III	30 ORANG
15	PANDU S P	Kelurahan RT 03 RW III	60 ORANG
16	OWI KUSUM S P	Kelurahan RT 04 RW III	51 ORANG
17	KASIMDI	Kelurahan RT 05 RW III	11 ORANG
18	ALI PRANOTO	Kelurahan RT 06 RW III	33 ORANG
19	ARI BUDI SUSILO	Kelurahan RT 07 RW III	11 ORANG
20	SAMSUDIN	Kelurahan RT 01 RW IV	136 ORANG
21	AGUS MAHMOUD S P	Kelurahan RT 02 RW IV	59 ORANG
22	WISNO	Kelurahan RT 03 RW IV	58 ORANG
23	TOTOK HARWANTO	Kelurahan RT 04 RW IV	91 ORANG
24	SUTARJO	Kelurahan RT 05 RW IV	82 ORANG
25	FORNAN PRASETYO	Kelurahan RT 06 RW IV	7 ORANG
26	FORNAN	Kelurahan RT 01 RW V	50 ORANG
27	FORNAN	Kelurahan RT 02 RW V	24 ORANG
28	FORNAN	Kelurahan RT 03 RW V	49 ORANG
29	FORNAN	Kelurahan RT 04 RW V	13 ORANG

Gambar 2. Jumlah Peserta Penerima JKN Kelurahan Bujel
Sumber : Arsip Dokumentasi Staff Kelurahan Bujel

membayar iuran JKN.

Permasalahan lain yang berkaitan dengan kesehatan adalah ketidakmampuan masyarakat untuk mendatangi puskesmas dalam melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Maka p Prodama Plus memberikan fasilitas untuk kader posyandu dalam mengadakan kebutuhan mebeleur dan alat – alat kesehatan serta untuk melaksanakan PMT. Melalui pengadaan kebutuhan tersebut kader posyandu dapat melaksanakan kegiatan posbindu bersamaan dengan kegiatan PMT. Dalam kegiatan PMT kader posyandu memberikan makanan dengan menu “4 sehat 5 sempurna” sekaligus pemeriksaan kesehatan bagi balita dan lansia. Hal ini sependapat dengan pendapat Ibu Anik sebagai salah satu kader posyandu di Kelurahan Bujel

“Posyandu cukup terbantu untuk memfasilitas posyandu buat pengadaan alat – alat kesehatan sama PMT. Selain Covid – 19, Posyandu juga dihadapkan untuk menangani pencegahan stunting. Jadi, Prodama sangat membantu sekali untuk mengadakan kebutuhannya itu. Kader tidak terbebani untuk membiayai PMT sama alat

kesehatannya,”

Pada kegiatan PMT di setiap posyandu masyarakat yang mengantarkan balita atau lansia bisa melakukan pemeriksaan kesehatan seperti memeriksa tensi, gula darah, asam urat, dan kolesterol. Apabila ditemukan masalah kesehatan maka kader posyandu akan memberikan rekomendasi sesuai arahan dari bidan wilayah untuk merujuk masyarakat yang memiliki masalah kesehatan agar memeriksakan diri di puskesmas.

Masalah lain yang ditemui selama di Kelurahan Bujel selama pandemi COVID – 19 adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan. Pengurus RT mengusulkan tempat cuci tangan, masker dan handsanitizer dalam alokasi Prodmas Plus. Kemudian kebutuhan tersebut dibagikan kepada warga agar digunakan selama beraktivitas di masa pandemi. Kader posyandu di setiap RT mengedukasi warga dalam menerapkan protokol kesehatan seperti memberi contoh tentang pemakaian masker serta mempraktikkan mencuci tangan yang baik dan benar. Sarana dan prasarana lainnya yang mendukung untuk menjaga kebersihan lingkungan adalah adanya mesin penyemprotan disinfektan untuk setiap RT. Sehingga warga dapat melaksanakan penyemprotan disinfektan secara efisien dalam waktu yang telah ditentukan.

Pada kriteria kecukupan, program Prodmas Plus telah mencukupi penyelesaian berbagai permasalahan terkait kesehatan masyarakat Kelurahan Bujel. Melalui Prodmas Plus, terdapat kegiatan tambahan seperti posbindu di samping pelaksanaan PMT. Kemudian pelaksanaan program Prodmas Plus juga telah membantu Kelurahan Bujel dalam menyediakan sarana dan prasarana untuk mendorong masyarakat mematuhi protokol kesehatan selama masa pandemi COVID – 19.

4. Pemerataan

Pemerataan berkaitan dengan distribusi manfaat dari sebuah kebijakan. Sebuah kebijakan memenuhi kriteria pemerataan apabila manfaat tersebut bisa dirasakan oleh kelompok – kelompok yang terlibat di dalam kebijakan. (Nasution, 2017).

Pada pelaksanaan Prodmas Plus manfaat dari kegiatan – kegiatan yang dibiayai langsung oleh Prodmas Plus bisa dirasakan oleh masyarakat. Dengan adanya pembayaran iuran JKN yang sudah ditopang oleh Prodmas Plus dapat membantu masyarakat Kelurahan Bujel yang tidak mampu membayar iuran JKN. Sehingga melalui kegiatan ini manfaat yang didapatkan adalah kemudahan

masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas kesehatan untuk berobat. Sedangkan bagi otoritas Kelurahan Bujel adanya kegiatan pembayaran iuran JKN membantu Kelurahan Bujel untuk menanggung masyarakat yang tidak mampu dalam membayar iuran JKN. Sebab dalam hal ini pemerintah Kota Kediri melibatkan dinas kesehatan Kota Kediri untuk pembayaran iuran JKN.

Kemudian dari kegiatan dan keperluan Posyandu yang dibiayai oleh Prodmas Plus manfaatnya juga dirasakan langsung oleh masyarakat serta kader Posyandu. Kegiatan PMT yang dibiayai Prodmas Plus mampu menyediakan kebutuhan yang mendukung pemenuhan gizi bagi kelompok bawah lima tahun dan kelompok masyarakat lanjut usia. Sedangkan bagi kader posyandu adanya Prodmas Plus bagi bidang kesehatan memberikan kemudahan dalam pengadaan kebutuhan mebeleur posyandu dan dalam



Gambar 3. Pelaksanaan PMT di Posyandu Dahlia Kelurahan Bujel

Sumber : Arsip Dokumentasi Posyandu Dahlia RT 03 RW 01 Kelurahan Bujel

memenuhi keperluan pengadaan alat – alat kesehatan.

Manfaat lain yang juga dirasakan oleh masyarakat dan kader posyandu adalah dengan diadakannya pos pembinaan terpadu. Dimana seluruh alat untuk pemeriksaan kesehatan dapat diperoleh melalui Prodmas Plus. Maka manfaat yang didapatkan oleh masyarakat adalah kemudahan untuk dapat menjangkau fasilitas kesehatan terdekat. Lalu untuk kader posyandu dan bidan wilayah juga memudahkan dalam memantau kesehatan

masyarakat dalam masa pandemi COVID – 19.

Pada pengadaan sarana prasarana untuk menunjang perilaku hidup bersih manfaat yang dirasakan juga sudah merata. Masyarakat kelurahan Bujel memperoleh masker dan handsanitizer dari pengurs RT melalui Prodama Plus. Sedangkan bagi pihak Kelurahan program ini membantu dalam pencegahan dan pengendalian COVID – 19 di Kelurahan Bujel. Serta membantu Kelurahan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan selama masa pandemi berlangsung.

Pemerataan manfaat dari program Prodama Plus dirasakan oleh semua pihak di lingkungan Kelurahan Bujel. Distribusi manfaat tidak hanya dirasakan oleh masyarakat sebagai sasaran langsung dari Prodama Plus. Akan tetapi juga bermanfaat bagi otoritas Kelurahan Bujel dalam mengakomodir kebutuhan umum masyarakat di bidang kesehatan. Maka kelompok masyarakat Kelurahan Bujel sangat mempertimbangkan manfaat dari usulan masyarakat. Tujuannya agar keberadaan sarana dan prasarana atau kegiatan yang dibiayai oleh Prodama Plus manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat dan tidak menjadi konsumsi pribadi untuk sebagian pihak.

5. Responsivitas

Responsivitas merupakan tanggapan terhadap sebuah kebijakan. Keberhasilan dari kebijakan atau kegiatan juga dilihat dari respon atau tanggapan masyarakat. (Anggraeni, 2018). Melalui kriteria responsivitas baik masyarakat dan pemerintah dapat memberikan tanggapan mengenai pelaksanaan sebuah kebijakan.

Pelaksanaan Prodama Plus pada bidang kesehatan di kelurahan Bujel mendapatkan respon positif dari masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sulistyorini sebagai ketua RT 03 RW 02 di Kelurahan Bujel bahwa masyarakat menyambut antusias setiap kegiatan yang dibiayai oleh Prodama Plus. Sehingga masyarakat lebih semangat untuk ikut berpartisipasi mendukung kegiatan – kegiatan di lingkungan RT.

Pendapat serupa juga disampaikan oleh Ibu Novi selaku bidan wilayah untuk Kelurahan Bujel. Dalam wawancara dengan Ibu Novi beliau menyampaikan bahwa Prodama Plus begitu membantu pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan,

“Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk Prodama Plus karena telah membantu kami dalam melaksanakan

setiap kegiatan di bidang kesehatan. Kami senang kalau masyarakat lebih *aware* untuk memeriksakan diri melalui kegiatan posbindu. Kalau dulu yang datang hanya pengantarnya saja, sekarang bisa ngajak saudara atau tetangga untuk ikut serta dalam pemeriksaan kesehatan,”

Menurut Ibu Novi bahwa dengan adanya Prodama Plus yang telah memberikan alokasi anggaran untuk bidang kesehatan dapat memotivasi masyarakat untuk lebih memperhatikan kesehatan di masa pandemi dengan rutin memeriksakan kesehatan di posyandu terdekat. Dengan diadakannya PMT dan posbindu yang seluruh sarana dan prasarannya dibiayai oleh Prodama Plus mampu mendorong partisipasi masyarakat untuk kegiatan posyandu dengan kehadiran diatas 80 %.

Hal ini sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan dalam penelitian. Dari observasi diperoleh hasil bahwa masyarakat antusias untuk mengikuti kegiatan PMT dan posbindu yang diselenggarakan oleh posyandu. Manfaat yang secara tidak langsung didapatkan dari pelaksanaan Prodama Plus mendapat respon yang bagus dari masyarakat. Dimana satu balita atau lansia peserta PMT bisa diantarkan oleh lebih dari tiga anggota keluarga. Kehadiran keluarga pengantar peserta di posyandu merupakan bentuk antusias masyarakat untuk memeriksakan kesehatan melalui kegiatan posbindu. Dimana seluruh alat pemeriksaan kesehatan diadakan melalui anggaran Prodama Plus.

Sedangkan bagi Kelurahan, pelaksanaan Prodama Plus dalam bidang kesehatan telah membantu Kelurahan Bujel dalam memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa pandemi. Mulai dari pembayaran iuran JKN yang ditanggung dan dibayarkan langsung kepada dinas kesehatan.

Kemudian penganggaran wajib untuk pelaksanaan PMT serta usulan untuk pengadaan keperluan posyandu. Serta membantu setiap RT di Kelurahan Bujel memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana untuk menunjang perilaku hidup bersih seperti pengadaan tempat cuci tangan, masker, handsanitizer, serta pengadaan mesin pompa disinfektan. Pengurus kelurahan bujel menyambut dengan antusias kebijakan ini dan sangat terbantu karena fokus Prodama Plus untuk periode 2021 adalah pada bidang kesehatan.

Responsivitas yang ditunjukkan oleh masyarakat Kelurahan Bujel dan otoritas Kelurahan adalah antusias. Dari otoritas Kelurahan Bujel

menyambut baik adanya program Prodama Plus dalam membantu kinerja Kelurahan untuk membiayai dan mengadakan kebutuhan masyarakat Bujel di bidang kesehatan. Begitupun masyarakat yang juga menyambut dengan antusias berlangsungnya program Prodama Plus. Sehingga mendorong masyarakat dalam berpartisipasi mewujudkan lingkungan Kelurahan Bujel yang sehat.

6. Ketepatan

Ketepatan berkaitan dengan rasionalisasi sebuah kebijakan untuk memenuhi kebutuhan yang dirasa penting oleh publik. (Asyiah.dkk, 2018:8) Ketepatan merupakan kriteria yang digunakan untuk menyeleksi sejumlah alternatif dalam memecahkan suatu permasalahan. Melalui kriteria ini suatu kebijakan dapat dilihat kelayakannya dalam memecahkan suatu permasalahan yang terjadi di sebuah lingkungan masyarakat.

Pelaksanaan Prodama Plus dalam bidang kesehatan untuk kegiatan JKN sudah dinilai tepat. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sholeh selaku tim pokmas Kelurahan Bujel,

“Untuk JKN, sangat membantu terutama untuk masyarakat yang ekonominya lemah. Apalagi kalau yang bersangkutan juga tidak terdaftar dalam BPJS. Soalnya kalau tidak ada JKN masyarakat harus bayar obat sendiri. Tapi kalau ada JKN berobatnya bisa gratis,”

Adanya iuran JKN yang ditopang Prodama Plus membantu masyarakat untuk meringankan beban ekonomi. Sehingga kegiatan ini dinilai tepat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan jaminan kesehatan nasional.

Dalam pelaksanaan PMT dan pengadaan alat – alat mebeleur posyandu, pelaksanaan Prodama Plus juga dinilai sudah tepat. Namun terdapat masukan dalam pelaksanaan Prodama Plus untuk menunjang kegiatan PMT seperti hasil wawancara yang disampaikan oleh Ibu Sumiyati sebagai kader Posyandu Dahlia, “Ya, kalau bisa untuk PMT nya ditambah, Mas. Kemudian untuk intensitas pelaksanaannya di periode selanjutnya bisa ditingkatkan kembali agar setiap bulan bisa diadakan PMT,” meskipun sudah tepat akan tetapi pelaksanaan kegiatan PMT membutuhkan alokasi yang lebih banyak daripada tahun ini. Hal ini diutarakan oleh Ibu Sumiyati agar seluruh menu PMT bisa dialokasikan melalui Prodama Plus.

Untuk kegiatan pemenuhan kebutuhan

mebeleur posyandu, alat kesehatan, serta pengadaan sarana dan prasarana dalam menunjang perilaku hidup bersih juga sudah tepat. Adanya sarana dan prasarana pada bidang kesehatan di Kelurahan Bujel mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memeriksa kesehatan selama masa pandemi. Kemudian pemenuhan sarana dan prasarana tersebut juga membantu Kelurahan Bujel untuk mencegah serta mengendalikan penyebaran COVID – 19 yang hingga saat ini masih berlangsung.

Program Prodama Plus pada periode 2021 dinilai tepat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Bujel di bidang kesehatan. Termasuk dalam menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan kesehatan di lingkungan Kelurahan Bujel. Meskipun sudah tepat, akan tetapi perlu adanya perbaikan program terutama dalam membiayai kegiatan yang diselenggarakan secara rutin dalam satu periode.

PENUTUP

Simpulan

Pelaksanaan Prodama Plus pada bidang kesehatan di Kelurahan Bujel, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri telah memenuhi indikator evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn. Pelaksanaan Prodama Plus dalam bidang kesehatan sudah berjalan efektif karena telah memenuhi tujuan pelaksanaan Prodama Plus. Program ini telah membantu otoritas Kelurahan Bujel dan masyarakat Bujel untuk memperoleh sarana dan prasarana serta pembiayaan kegiatan di bidang kesehatan. manfaat yang dirasakan merata, tidak hanya dirasakan oleh masyarakat tetapi juga dirasakan oleh otoritas kelurahan Bujel karena telah membantu membiayai keperluan masyarakat. Sehingga masyarakat Bujel dan pihak kelurahan menyambut dengan antusias berjalannya Prodama Plus. Maka program Prodama Plus ini dinilai tepat dalam membantu pembiayaan kegiatan di bidang kesehatan serta membantu mengadakan sarana dan prasarana untuk keperluan masyarakat umum dalam mengatasi masalah kesehatan di masa pandemi COVID – 19.

Saran

1. Alokasi anggaran Prodama Plus untuk usulan yang sifatnya wajib agar jumlahnya dapat ditingkatkan sehingga bisa memenuhi kebutuhan sasaran dan kegiatan bisa dilaksanakan secara rutin.
2. Diperlukan komunikasi dan koordinasi untuk pelaksanaan kegiatan yang bersifat wajib supaya masyarakat dan pengurus RT memperoleh pertanggungjawaban dari

pelaksanaan kegiatan di bidang kesehatan yang dibiayai oleh Prodama Plus.

Ucapan Terima kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu dan berkontribusi dalam penulisan artikel diantaranya :

1. Tuhan YME.
2. Seluruh dosen program studi S1 Ilmu Administrasi Negara.
3. Ibu Dr. Tjitjik Rahaju, S.Sos., M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dalam penulisan artikel ilmiah ini.
4. Ibu Indah Prabawati, S.Sos., M.Si. dan Ibu Dr. Suci Megawati, S.I.P., M.Si. selaku dosen penguji.
5. Orang tua dan keluarga penulis yang selalu memberikan semangat dan doa.
6. Seluruh staff, jajaran, dan masyarakat Kelurahan Bujel Kecamatan Mojoroto Kota Kediri.
7. Rekan – rekan mahasiswa program studi S1 Ilmu Administrasi Negara 2018.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, Y. (2018). *Evaluasi Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Pembangunan Infrastruktur di RT 037 RW 011 Kelurahan Mojoroto Kota Kediri)* Yosa Anggraeni 15040674106. 1504067410.
- Asmoro, W. K. (2019). Good Governance Government Dalam Penerapan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Prodama. *Jurnal Politeknik Negeri Malang PSDKU Kediri*, 256–264.
- Asmoro, W. K., & Setianingsih, N. A. (2019). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana “Prodama” dalam Mewujudkan Good Government Governance di Tingkat Kelurahan Pemerintahan Kota Kediri. *Owner*, 3(2), 270. <https://doi.org/10.33395/owner.v3i2.171>
- Asyiah, Siti, dkk. (2018). Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis Di Kabupaten Pasaman. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v2n1.p1-9>
- Ciotti, M., Ciccozzi, M., Terrinoni, A., Jiang, W. C., Wang, C. Bin, & Bernardini, S. (2020). The COVID-19 pandemic. *Critical Reviews in Clinical Laboratory Sciences*, 57(6), 365–388. <https://doi.org/10.1080/10408363.2020.1783198>
- Eger, C., Miller, G., & Scarles, C. (2018). Gender and capacity building: A multi-layered study of empowerment. *World Development*, 106, 207–219. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.01.024>
- Farhan, dkk. (2017). Strategi Pemerintah Kota Kediri Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Prodama (Studi Penelitian di Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan di Desa Tamanan RT 01 RW 03). *Economic Syaria Law*, 1 : 2, 38–67.
- Khalid, S., Ahmad, M. S., Ramayah, T., Hwang, J., & Kim, I. (2019). Community empowerment and sustainable tourism development: The mediating role of community support for tourism. *Sustainability (Switzerland)*, 11(22). <https://doi.org/10.3390/su11226248>
- Luisi, D., & Hämel, K. (2021). Community participation and empowerment in primary health care in Emilia-Romagna: A document analysis study. *Health Policy*, 125(2). <https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2020.11.007>
- Lystianingrum, N., & Philona, R. (2021). Hukum Penegakan Proses. *Binawakya*, 15(7), 4727–4740.
- Muchson, M. (2020). *The Implementation of Prodama to Increase the People ' Prosperity*. 7(November), 258–266.
- Muhammad Farid Ma'ruf & Prasetyo Isbandono. (2016). Urgensi Kerjasama Antar Daerah (Intergovernmental) Dalam Penanganan Bencana Alam Di Daerah. *Journal of PublicSector Innovations*, 1(1), 47–54.
- Muhawarman, A, dkk. (2017). Formulasi Kebijakan Komunikasi Untuk Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan. *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 13(2), 97. <https://doi.org/10.30597/mkmi.v13i2.1980>
- Nasution, I. (2017). Evaluasi Implementasi Kebijakan Tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional (Studi Pada Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II) Oleh. *Jom Fisip*, 4(2), 1–13.
- Nur, Ulil Albab & Tjitjik Rahaju. 2020. Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Di Kelurahan Bujel Kecamatan Mojoroto Kota Kediri. *Jurnal Publika Universitas Negeri Surabaya*, 8 (5), 1-12
- Parr, S., Wolshon, B., Renne, J., Murray-Tuite, P., & Kim, K. (2020). Traffic Impacts of the

- COVID-19 Pandemic: Statewide Analysis of Social Separation and Activity Restriction. *Natural Hazards Review*, 21(3), 04020025.
[https://doi.org/10.1061/\(asce\)nh.1527-6996.000040](https://doi.org/10.1061/(asce)nh.1527-6996.000040)
- Peraturan Walikota Kediri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Plus
- Pratiwi, D. K. (2021). Inovasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanganan Covid-19 di Indonesia. *Amnesti Jurnal Hukum*, 3(1), 37–52. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v3i1.929>
- Putri, R. N. (2020). Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 705. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.1010>
- Setianingsih, N. A., & Aalin, E. R. (2020). PRODAMAS and the Effect on Infrastructure Growth. 123(Icamer 2019), 116–118. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200305.029>
- Soulisa, N. (2017). Evaluasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Pada Sekolah Negeri Di Kecamatan Palu Timur. *Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Pada Sekolah Negeri Di Kecamatan Palu Timur. Katalogis*, 5(1), 91–98.
- Suherman, D. (2020). Peran Aktor Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Mengatasi Penyebaran COVID-19 Di Indonesia. *Ministrate: Jurnal Birokrasi Dan Pemerintahan Daerah*, 2(2), 51–62. <https://doi.org/10.15575/jbpd.v2i2.9383>
- Susilawati, Elis, D. (2020). Peningkatan Ketahanan Pangan Dan Pemenuhan Gizi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat (JUPEMAS)*, 1(2), 39–44. https://www.ejurnal.stikes-bth.ac.id/index.php/P3M_JUPEMAS/article/view/645
- Widyastuti, D. (2018). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Prodama Pemerintah Kota (Pocanan, Kota Kediri, Jawa Timur). *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 7.
- Yang, L., Liu, S., Liu, J., Zhang, Z., Wan, X., Huang, B., Chen, Y., & Zhang, Y. (2020). COVID-19: immunopathogenesis and Immunotherapeutics. *Signal Transduction and Targeted Therapy*, 5(1), 1–8. <https://doi.org/10.1038/s41392-020-00243-2>
- Zakaria, M. R. (2016). JURNAL REVITALISASI Jurnal Ilmu Manajemen Vol . 5 , Nomor 3 , September 2016. 5(September), 105–111.
- Zulpahmi, Z., Badaruddin, B., & Humaizi, H. (2020). Peran Modal Sosial dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Maju Bersama di Desa Sei Jawi-Jawi Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan. *Perspektif*, 9(2), 168–182. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v9i2.3346>